

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Penulis dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian terkait dengan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah pada Pelayanan Infrastruktur Jalan di perbatasan antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Panguragan dengan Kecamatan Klängen yang dilakukan di Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon. Insfrastruktur jalan yang ada diperbatasan kecamatan panguragan dan kecamatan klängen sepanjang 3 KM keadaannya sangat rusak parah, jalan merupakan pondasi bagi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu Pemerintah dan Rakyat indonesia saat ini dalam masa pembangunan , bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus meningkatkan dan merubah tujuan tersebut kearah yang lebih baik dan merubah tujuan tersebut kearah yang lebih baik, melalui pelaksanaan program-program pembangunan jalan yang merupakan jaringan transportasi yang paling dominan digunakan oleh penduduk untuk beraktivitas.

Pembangunan jalan ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan dari berbagai sisi dan aspek, masyarakat dan mendapatkan berbagai keuntungan dalam pembangunan jalan ini, karena setiap aktivitas masyarakat tidak lepas dari jalan, oleh karena itu pembangunan jalan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan.

Sejak tahun 2012 jalan poros panguragan dengan klangenan ini sudah mengalami kerusakan parah dan tidak pernah diperbaiki, jalan rusak sepanjang sekitar 3KM, banyak lubang-lubang disepanjang jalan dan kondisi sangat tidak memungkinkan.

**Gambar 3.1**



*Sumber: Lokasi gambar dijalan perbatasan Kecamatan Panguragan dengan Kecamatan Klangenan*

Menurut Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon kondisi tanah yang terdapat pada jalan poros diperbatasan klangenan dengan panguragan masih sangat labil, jalan tersebut harus diperbaiki dengan menggunakan beton sehingga bisa bertahan pada umur yang ditentukan. Dari kedua kecamatan tersebut sudah melakukan musrenbang dengan pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon untuk melakukan perbaikan jalan poros dan akan dilaksanakan pada tahun 2017.

## A. Efektifitas Kecapaian Hasil yang sesuai dengan Tujuan Program

### a) Hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan program yang akan dicapai

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dijalankan. Efektivitas merupakan gambaran dari apakah hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan program yang akan dicapai atau sudah tepat dan memiliki manfaat. Dapat dilihat kriteria dari efektifitas program kinerja Bina Marga Kabupaten Cirebon, dari beberapa tabel berikut ini :

**Tabel 3.1 meningkatkan dan memelihara fungsi jaringan jalan kabupaten 2014**

<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Ket</b>
1. Jalan Kabupaten yang ditingkatkan	Km	35,12	35,12	100	Target Tercapai
2. Jembatan Kabupaten yang ditingkatkan	Buah	5	5	100	Target Tercapai
3. Jalan Kabupaten yang terpelihara rutin	Km	562,20	562,20	100	Target Tercapai
4. Jembatan kabupaten yang terpelihara	Km	157 jmbtn	157 jmbtn	100	Target Tercapai
5. Database jalan dan Jembatan	Dok	2	2	100	Target Tercapai

*Sumber: Lakip Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon 2014*

Dari Tabel diatas dapat dilihat dari Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka Pengendalian Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan target 1 Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada kenyataannya tidak tercapai, karena di tahun 2014 masih banyak jalan yang rusak, jalan sepanjang 562,20 km yang tertera di lakip belum cukup baik karena setelah penulis teliti pada saat itu

jalan di Kabupaten Cirebon belum merata, contoh kecil ada di jalan utama antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Gebang dengan Kecamatan Babakan, jalan tersebut merupakan jalan penghubung untuk arah ke Jakarta, Bandung dll, dan yang terlealisasi menurut penulis hanya 40%, karena banyak jalan penghubung antara dua kecamatan dan desa masih banyak yang rusak.

**Tabel 3.2 Meningkatkan dan Memelihara Fungsi Jaringan Jalan Perdesaan 2014**

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1. Jalan Desa/Poros Desa yang ditingkatkan	Km	43,09 km	43,09 km	100	Target Tercapai
2. Jembatan Desa Yang ditingkatkan	Buah	7 jembatan	7 Jembatan	100	Target tercapai
3. Jalan desa/Poros Desa yang dipelihara	Km	164,43 km	164,43 km	100	Target Tercapai

*Sumber: Lakip dinas Bina Marga Kbuupaten Cirebon 2014*

Pada tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan termasuk dalam Kebijakan Penajaman dan Penetapan Daftar Skala Prioritas pada kegiatan-kegiatan kebinamargaan tahun anggaran 2014, beberapa kriteria dan pertimbangan yang digunakan dalam penetapan Daftar Skala Prioritas kebinamargaan tersebut antara lain Pertimbangan teknis (tingkat kerusakan, siklus penanganan dll), Ruas jalan yang termasuk dalam JJS Ruas-ruas jalan penghubung sentra-sentra produksi pertanian dan industry/perdagangan. Ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan alternative,

terutama pada hari-hari raya. Ruas-ruas jalan yang merupakan jalur perlintasan antar daerah Kabupaten/Kota. Ruas jalan yang akan menunjang pertumbuhan pada kawasan pemukiman. Aspek pemerataan pembangunan Daerah untuk tahun 2014 Ruas jalan Desa yang ditingkatkan sepanjang 43,09 km, 7 Buah Jembatan Perdesaan dan Jalan Desa yang dipelihara sepanjang 164,43 Km semuanya dapat direalisasikan.

Dari penjelasan yang dijelaskan oleh Lakip tidak seutuhnya benar ada beberapa yang kurang terlealisasi, yang penulis rasakan pada tahun 2014 pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan kebijakannya dengan baik jalan di Kabupaten Cirebon banyak sekali yang rusak, salah satunya yaitu diajalan perbatasan Gebang, Babakan, dan Ciledug keadannya gali lobang tuutp lobang jadi sekedar menambal saja dan tidak lama lagi tidak ada hitungan 3 bulan sudah rusak lagi, begitupun yang terjadi di jalan alternatif yaitu perbatasan Kecamatan Panguragan dengan Kecamatan Klangena sejak tahun 2012 sudah rusak parah namun tidak ada perbaikan sama sekali dari pemerintah daerah, menurut surat kabar yang saya baca.

Dari komentar warga sekitar yang penulis wawancari mereka berkata bahwasannhya jalan alternatif ini sama sekali belum diperbaiki sedikitpun oleh pemerintah daerah, warga sekitar dan pamong desa sudah melakukan musrenbang bersama pemerintah kabupaten Cirebon namun tetap saja jalan seperti itu dalam keadaan yang tidak layak untuk dilintasi, padahal jalan tersebut adalah sumber ekonomi bagi mereka.

Pada tanggal 02 febuari 2017 terdapat berita disebuah surat kabar yaitu jabar publisher yang membahas terkait infrastruktur di kabupaten Cirebon, hingga 65% lebih jalan di kabupaten Cirebon rusak, dari total luas jalan kabupaten 650,74 KM, 35,83%, kondisinya memang baik tetpai 30,98% rusak, 13% dan rusak berat, 15% sementara itu jalan desa sepanjang 589,57KM konsisinya dalam keadaan baik, sedangkan 32% rusak 20% rusak, dan 25% rusak berat. (Dikutip dari : <http://www.jabarpublisher.com/index.php/2017/02/03/65-jalan-di-kabupaten-cirebon-rusak-dewan-sindir-keras-pemkab/>).

**Tabel 3.3 Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan untuk kelancaran arus lalu lintas dan mempermudah akses perekonomian 2015**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
<b>I. Proposi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap</b>	Km	506,49	481,68	95,10	6
<b>1.</b> Tersedianya dokumen teknis perencanaan peningkatan jalan dan jembatan	Dok	1	1	100	
<b>2.</b> Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	Km	46,76	40,48	86,57	
<b>3.</b> Panjang jalan kabupaten yang dibangun	Km	0,187	0,187	100	
<b>4.</b> Jumlah Jembatan yang ditingkatkan	jembatan	7	7	100	
<b>5.</b> Tersedianya laporan pengawasan peningkatan jalan dan jembatan	Dok	1	1	100	
<b>6.</b> Tersedianya dokumen teknis perencanaan Rehabilitas/Pemeliharaan	Dok	1	1	100	

aan jalan dan jembatan					
<b>7.</b> Panjang Jalan kabupaten yang dipelihara secara rutin	Km	575,86	577,06	100	
<b>8.</b> Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara periodic	Km	3,4	3,21	94,41	
<b>9.</b> Jumlah Jembatan Kabupaten yang terpelihara	Jembatan	158	158	100	
<b>10.</b> Trsedianya laporan pengawasan Rehabilitas/Pemeliharaan jalan dan jembatan	Dok	1	1	100	
<b>11.</b> Tersedianya dokumen teknis perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan	Dok	1	1	100	
<b>12.</b> Jumlah Bangunan Pelengkap jalan yang dibangun - Gorong-gorong - Saluran/Senderan	Unit M	14 13.736/ 7,760	15 3,637/7 661	101	
<b>13.</b> Tersedianya laporan pengawasan pembangunan Slauran/Gorong-gorong	Dok	1	1	100	
<b>14.</b> Tersedianya data kondisi jalan	Dok	1	1	100	
<b>15.</b> Tersedianya data kondisi jembatan	Dok	1	1	100	
<b>16.</b> Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang milik jalan yang dipergunakan masyarakat	Dok	1	1	100	
<b>17.</b> Jumlah patok Km/Hm yang terpasang	Buah	846	846	100	
<b>18.</b> Pemebebasan lahan keperluan jalan	M <sup>2</sup>	13.982	13982	100	

II. Porsi Panjang Jaringan Jalan Desa dalam kondisi mantap.	<b>Km</b>	<b>350,81</b>	<b>371,45</b>	<b>105,88</b>	
1. Panjang Jalan Desa	Km	51,48	52,14	101,28	
2. Jumlah Jembatan Desa yang ditingkatkan	jembatan	9	8	88,89	
3. Panjang jalan Desa yang terpelihara	Km	192,53	200,85	104,32	
4. Tersedianya laporan pengawasan peningkatan/pemeliharaan Desa	Dok	1	1	100	

*Sumber : Lakip Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon 2015*

Lakip diatas memaparkan beberapa indikator yang menjelaskan terkait indikator proposi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap, tingkat capaian indikator pada table tersebut diatas belum mencapai target hal ini dikarenakan adanya kegiatan pekerjaan peningkatan jalan yang target penanganannya sepanjang 46,76 Km terlealisasi sepanjang 28,48 Km atau capaiannya 66,57%, hal tersebut dikarenakan adanya pekerjaan peningkatan jalan yang belum terselesaikan permasalahan tersebut disebabkan adanya tekanan yang kinerjanya kurang baik, serta adanya alokasi anggaran DAK tambahan 2015 yang belum terlealisasikan hal ini dikarenakan anggaran DAK tersebut teralokasi pada bulan Oktober 2015, sementara Tahun Anggaran 2015 menyisakan waktu 2 (dua) Bulan.

#### **b) Manfaat dari program untuk masyarakat**

Dari analisis, penulis mengemukakan manfaat dari program evaluasi pelayanan infrastruktur jalan di Kecamatan Panguragan dengan Kecamatan Klenganan untuk masyarakat salah satunya mempermudah akses perekonomian,

terhubungnya antara pasar dari dua kecamatan, diantaranya pasar yang ada di Kecamatan Klungenan pasar jungango dan pasar di Kecamatan Panguragan pasar jungang dan pasar wates, banyak pengunjung yang melintasi di jalan perbatasan antara Kecamatan Panguragan dengan Kecamatan Klungenan diantaranya masyarakat yang melintasi memakai roda dua, roda empat dan mobil pengangkut sayur-sayuran dan lain sebagainya,.

Adapun manfaat lainnya yang dirasakan dari evaluasi program perbaikan jalan ini bisa menghubungkan antara dua desa yakni desa yang ada di Kecamatan Panguragan :

- a. Desa Gujeg
- b. Desa kalianyar
- c. Desa Kroya
- d. Desa Lemahtamba
- e. Desa Panguragan
- f. Desa Panguragan Kulon
- g. Desa Panguragan Lor
- h. Desa Panguragan Wetan

Desa yang ada di Kecamatan Klungenan yaitu :

- a. Desa Bangodua
- b. Desa Danawinangun
- c. Desa Jemaras kidul
- d. Desa Klungenan

- e. Desa Pekantingan
- f. Desa Slangit
- g. Desa Serang

Dari desa-desa diatas jika perbaikan jalan ini terlaksana maka akan sangat mudah akses jalan menuju ke desa-desa yang ada di dua Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Panguragan dengan Kecamatan Klangeran.

Dari Analisis Penulis pada Tahun 2015 tingkat capaian indikator belum terbilang cukup sempurna, dikarenakan adanya kegiatan pekerjaan peningkatan jalan yang target penggunaannya sepanjang 40,76 Km, yang terlealisasi sepanjang 40,48 Km atau tingkat capaiannya 42,57% dan masih kurang 57,24% lagi, hal ini disebabkan adanya rekanan kinerja yang kurang baik, terkait dengan dana alokasi anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) ada yang belum terlealisasi karena anggaran DAK tersebut teralokasi pada bukan oktober 2015 menyisakan waktu 2 bulan, pada kegiatan yang anggarannya bersumber dari DAK tambahan tahun 2015 akan terlealisasikan pada tahun 2016.

Setelah penulis teliti ulang belum sepenuhnya dari tahun ke tahun infrastruktur dikabupaten masih terbilang buruk, jkarena masih banyak masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut, seperti yang di lakukan oleh penulis yaitu melakukan wawancara kepada beberapa warga pada umumnya di kabupaten Cirebon dan khususnya di antara kecamatan panguragan dengan kecamatan klangeran kabupaten Cirebon, mereka masih mengeluhkan jalan alternatif yang mereka lintasi.

Informasi yang saya dapat pada tanggal senin, 5 Januari 2015 oleh Radar Cirebon adalah sebagian besar kondisi jalan di kabupaten Cirebon hancur 70% dan 30% terlihat baik, jalan merupakan salah satu sarana yang cukup vital untuk meningkatkan kemajuan kabupaten Cirebon, sebab dengan jalan yang berkualitas masyarakat yang akan semakin mudah dan lancar, tetapi kenyataan dari pemerintah kurang memadai. (Dikutip dari : <http://www.radarcirebon.com/bupati-sunjaya-genjot-perbaikan-infrastruktur.html>).

**Tabel 3.4 Meningkatnya Kondisi Jaringan Jalan untuk Kelancaran Arus Lalu Lintas dan Mempermudah Akses Perekonomian**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
<b>I. Proposi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap</b>	Km	547,49	529,09	96,56	
<b>1. Tersedianya dokumen teknis perencanaan peningkatan jalan dan jembatan</b>	Dok	1	1	100,00	
<b>2. Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan</b>	Km	70,68	89,52	126,66	
<b>3. Panjang jalan kabupaten yang dibangun</b>	Km	-	0,153	100,00	
<b>4. Jumlah Jembatan yang ditingkatkan</b>	jembatan	5	5	100,00	
<b>5. Tersedianya laporan pengawasan peningkatan jalan dan jembatan</b>	Dok	1	1	100	

6. Tersedianya dokumen teknis perencanaan Rehabilitas/Pemeliharaan jalan dan jembatan	Dok	1	1	100	
7. Panjang Jalan kabupaten yang dipelihara secara rutin	Km	620,00	620,00	100,00	
8. Panjang Jalan Kabupaten yang dipelihara secara periodic	Km	3,4	0	0	
9. Jumlah Jembatan Kabupaten yang terpelihara	Jembatan	2	2	100,00	
10. Tersedianya laporan pengawasan Rehabilitas/Pemeliharaan jalan dan jembatan	Dok	1	1	100,00	
11. Tersedianya dokumen teknis perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan	Dok	1	1	100,00	
12. Jumlah Bangunan Pelengkap jalan yang dibangun - Gorong-gorong - Saluran/Senderan	Unit M	10 25.010	16 27.987	160,00 111,90	
13. Tersedianya laporan pengawasan pembangunan Slauran/Gorong-gorong	Dok	1	1	100,00	
14. Tersedianya data kondisi jalan	Dok	1	1	100,00	
15. Tersedianya data	Dok	1	1	100,00	

<b>kondisi jembatan</b>					
16. Tersedianya Laporan Pemanfaatan Ruang milik jalan yang dipergunakan masyarakat	Dok	1	1	100,00	
17. Jumlah patok Km/Hm yang terpasang	Buah	2.400	2.563	106,79	
18. Pemebebasan lahan keperluan jalan	HA	6,01	0	0	
<b>II. Porsi Panjang Jaringan Jalan Desa dalam kondisi mantap.</b>	<b>Km</b>	<b>390,90</b>	<b>360,12</b>	<b>92,13</b>	
1. Panjang Jalan Desa yang diingkatkan	Km	39	63,20	162,05	
2. Jumlah Jembatan Desa yang ditingkatkan	Jembatan	6	6	100,00	
3. Panjang jalan Desa yang terpelihara	Jembatan	2	3	150,00	
4. Panjang jalan Desa yang terpelihara	Km	187,01	190,15	101,68	
5. Tersedianya laporan pengawasan Peningkatan/Pemeliharaan jalan dan jembatan Desa	Dok	1	1	100,00	

*Sumber : Lakip Dinas Bina Marga Kab. Cirebon 2016*

Dari tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa program dan kegiatan yang mencakup terhadap pencapaian indikator kantor yang ingin dicapai tahun 2016 sebagaimana dari berita yang saya baca yaitu pada tanggal 22

april 2106 Radar Cirebon memebritakan banyak infrastruktur jalan yang dibangun dan diperbaiki di tahun 2014, 2015 dan 2016 baru menyelesaikan kurang lebih 40% jalan di kabupaten Cirebon dari 75% jalan yang rusak, maka ditahun 2017, setidak-tidaknya persen itu harus bisa kita selesaikan, akan tetapi kondisi infrastruktur jalan raya di Cirebon Timur benar-benar memprihatinkan, jalur utama penghubung Kecamatan Ciledug – Kecamatan Sindang rusak parah. Jika tidak berhati-hati, keselamatan warga dan penguadara menjadi taruhannya.

Selain jalur utama dua kecamatan, jalur sepanjang kurang lebih 11 kilometer tersebut merupakan jalur aktivitas ekonomi. Di sepanjang jalan aspal selebar 4 meter itu juga banyak terdapat lembaga pendidikan. Mulai SMA, MA, SMP, MTs, Sd hingga lembaga pendidikan lain, baik swasta maupun negeri.

Namun dengan sibuknya mobilitas masyarakat, tidak didukung dengan kekuatan infrastruktur jalan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah. Terlebih setiap hari, ratusan truk pengangkut pasir hingga truk bertonase tinggi hilir mudik tanpa ada pengaturan tegas, akibatnya jalan yang sudah rusak semakin parah, ditambah musim hujan sejauh ini, menjadikan jalan raya kebanggaan masyarakat Cirebon Timur tersebut menjadi menganga, berlubang lebar dan dalam. Tentu saja banyak memakan korban kecelakaan.

## B. Efisiensi Manfaat Biaya dari Program untuk Mencapai Hasil yang Diinginkan.

Efisiensi merupakan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi dapat diartikan juga sebagai jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu, dapat dilihat dari keuangan Dinas Bina Marga untuk mencapai hasil yang diinginkan :

**Tabel 3.5 Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2014**

KODE	PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
<b>1.03.01.15</b>	Program pembangunan Jalan dan Jembatan	159.060.413.342	72.120.120.700	45,34
<b>1.03.01.15.01</b>	Perencanaan pembangunan jalan	542.275.090	535.556.500	98,76
<b>1.03.01.15.03</b>	Pembangunan Jalan	149.747.927.652	63.083.166.900	42,13
<b>1.03.01.15.05</b>	Pembangunan Jembatan	8.672.875.000	8.404.061.700	96,90
<b>1.03.01.15.06</b>	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	97.335.600	97.335.600	100

*Sumber : Lakip Dinas Bina Marga Kab. Cirebon 2014*

Pada perincian tabel diatas Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2014, Anggaran yang terlealisasi sebesar Rp. 72.120.120.700,- (45,34%), sedangkan seluruh jumlah anggaran yang tertera adalah Rp. 159.060.413.342,- disini menyimpan keraguan.

Dari sumber terpercaya yang saya ambil yaitu surat kabar Pikiran Rakyat pada tanggal 26 September 2013, infra struktur jalan yang rusak pada wilayah Kabupaten Cirebon telah dianggarkan sedikitnya 40 miliar rupiah. Alokasi dana tersebut sudah

tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 yang dijadwalkan akan diketuk palu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, meskipun alokasi dana tersebut mengalami peningkatan yang cukup drastis namun, akibat kerusakan infrastruktur jalan yang rusak dan jumlahnya sangat banyak, kemungkinan tidak sebanding, namun pada kenyataannya Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon menerima anggaran sebesar 150 miliar, yang sebagian besar dana itu untuk infrastruktur jalan. Seharusnya adanya anggaran itu secara langsung dapat mempercepat program perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon yang saat ini terdapat 158 ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dengan panjang 642,36 km. (<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2011/12/30/171325/anggaran-perbaikan-jalan-rusak-rp-40-miliar>).

Diakuinya, Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan kabupaten Cirebon pada tahun 2014 dianggarkan kurang lebih 72 miliar. Zona proyek peningkatan jalan sendiri dibagi dua apabila di wilayah barat pada tahun 2014 dianggarkan 40 miliar dari total biaya peningkatan jalan dengan panjang penanganan sebesar 5,19 km. sedangkan peningkatan jalan di wilayah timur sebesar 32 miliar atau 47,11% dari total biaya peningkatan jalan dengan panjang penanganan 4,42 km.

Dikatakan oleh Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon pada tanggal 24 Novemer 2016 Ir. Gatot Rachmanto “program 2014 akan memprioritaskan untuk memperbaiki jalan kabupaten dan jalan poros desa atau kecamatan sehingga mendukung roda

ekonomi dikawasan perdesaan atau kecamatan. Penggunaan jalan sendiri sesuai dengan kebutuhan lapangan dan banyaknya kendala yang dihadapi dalam meangani jalan rusak. Selain karena anggaran, faktor dalam tonase kendaraan juga sangat besar mempengaruhi kondisi jalan, rusaknya jalan tetap ditangani dengan serius, jika setiap tahun dianggarkan untuk projek jalan 150 miliar, baru bisa mengatasi rusaknya jalan dalam beberapa tahun”

Penulis menyimpulkan bahwasannya informasi dari Lakip ataupun surat kabar tidak selaras karena sagat jauh perbedaan anggaran yang terealisasikan, disini menyimpan keraguan terkait dengan jumlah anggaran yang dianggarkan, pada kenyataannya setiap tahun jalan yang di Kabupaten Cirebon sangat rusak banyak sejumlah warga yang mengeluh akan kerusakan jalan, masyarakat perlu adanya kepastian dari pemerintah agar masyarakatpun tidak rugi, mereka mengeluhkan jalan yang rusak karena banyaknya kejadian kecelakaan di Jalan kabupaten Cirebon, belum lagi kendaraan yang berjenis truk melintasi jalan yang ugal-ugalan sehingga sering terjadinya memakan korban, karena kondisi jalan tidak mendukung banyaknya lobang dan kendaraan yang melintaspun tidak berhati-hati.

**Tabel 3.6 Rehabilitas/Pemeliharaan jalan dan Jembatan 2015**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
1.03.01.18.	Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	19.262.820.924	17.811.628.700	92,47
1.03.01.18.01	Perencanaan Rehabilitas/Pemeliharaan jalan	302.772.500	301.155.500	99,80
1.03.01.18.03	Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan	18.444.431.224	17.005.111.000	92,20
1.03.01.18.05	Rehabilitas/Pemeliharaan Jembatan	432.901.000	421.645.000	97,40

1.03.01.18.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	83.717.200	83.717.200	100
---------------	-------------------------------------	------------	------------	-----

**Sumber : Lakip Dinas Bina Marga Kab. Cirebon 2015**

Berdasarkan pada perincian tabel diatas Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2015, Anggaran yang terlealisasi sebesar Rp. 17.811.628.700,- (92,47%) dan sisa anggaran pada Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah 1.451.192.224,- (7,53%) dari total pagu anggaran. Namun anggaran tersebut perlu adanya analisis ulang, penulis menganalisis dengan cara mencari sumber terpercaya terkait dengan anggaran untuk program perbaikan atau pemeliharaan infrastruktur jalan di kabupaten Cirebon.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Radar Cirebon memberitakan luasnya wilayah Kabupaten Cirebon membuat anggaran yang disediakan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur jalan sepertinya tidak pernah cukup. Pasalnya, jalan yang harus diurus Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon sepanjang 1.117,76 km, panjang jalan itu terdiri dari 647,56 km jalan kabupaten yang terdiri dari 183 ruas, dan 470,20 km jalan poros desa yang terdiri dari 275 ruas. Disini Kepala Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon Teti Meirawati menjelaskan, di masa pemerintahan Jago-Jadi, sedikitnya terdapat 19 ruas jalan yang masuk ke dalam program unggulan perbaikan infrastruktur. Ke 19 program unggulan itu menjadi prioritas dari pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, 19 ruas jalan yang masuk ke dalam program unggulan itu secara bertahap terus ditingkatkan kualitasnya, dan ruas jalan tersebutlah yang menjadi prioritas dalam pengembangan kualitas jalan. (<http://www.radarcirebon.com/diguyur-ratusan-miliar-tak-kunjung->

[tuntas.html](#)). Sementara itu penulis melakukan wawancara pada tanggal 24 November 2016 kepada Kepala Bidang Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon Bapak Ir. Gatot Rachmanto mengatakan :

“di tahun 2015 lalu sedikitnya ada 49 ruas jalan kabupaten Cirebon yang akan diperbaiki, 49 ruas jalan kabupaten Cirebon yang akan diperbaiki itu sepanjang 38,92 km dan menelan anggaran sekitar Rp. 50,195 miliar. Sementara untuk pemnangunan jalan dan jembatan desa, Dinas Bina Marga telah menganggarkan sebesar Rp. 49,746 miliar. Anggaran itu di peruntukan 226,6 km dan 8 jembatan desa, saya mengakui untuk menyiapkan akses jalan yang representatif bagi masyarakat memang dibutuhkan anggaran yang besar, sementara kekuatan anggaran yang ada pada saat itu tahun 2015 belum bisa secara optimal mendukung pembenahan infrastruktur. Meskipun begitu tim kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan program perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon, semuanya membutuhkan proses ada tahapan-tahapannya tidak langsung sekaigus langsung bagus seluruhnya”

Penulis menganalisis kembali antara data lakip dan wawancara ternyata anggaran yang tersedia sangat berbeda karena tidak ada keberanian dari Dinas Bina marga kabupaten Cirebon untuk mengungkapkan hal tersebut, akan tetapi di Jalan perbatasan Kecamatan Panguragan dengan kecamatan Klangea kabupaten Cirebon masih terbilang rusak, padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari pemerintah Kabupaten Cirebon, banyak dari warga sekitar yang mengeluhkan jalan yang rusak dan berlubang tersebut. Hal ini mengakibatkan kecelakaan pengendara yang melintas. Terlebih saat hujan datang, kondisi lubang akan tampak samar karena genangan air. Disana terlihat ada beberapa kendaraan yang melintas baik roda dua maupun empat menghindari lubang, adapula dengan terpaksa karena mendadak melewati lubang-lubang jalan. Jika tidak waspada pengendara bisa saja tergelincir jatuh, karena keadaan di jalan tersebut kanan kiri adalah selokan dan sawah.

**Tabel 3.7 Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2016**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
1.03.01.18.	Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.283.717.124	10.586.012.500	86,18
1.03.01.18.01	Perencanaan Rehabilitas/Pemeliharaan jalan	200.000.000	196.900.000	98,45
1.03.01.18.03	Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan	11.499.999.924	9.824.287.300	85,43
1.03.01.18.05	Rehabilitas/Pemeliharaan Jembatan	500.000.000	481.108.000	96,22
1.03.01.18.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	83.717.200	83.717.200	100,00

*Sumber : Lakip Dinas Bina Marga Kab. Cirebon 2016*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa program rehabilitas/ pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2016, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 10.586.012.500 (86,18%), dan anggaran yang tersisa adalah Rp. 1.697.704.624 (13,82%) dari total pagu anggaran, pada tabel ini penulis akan menganalisis anggaran terkait dengan pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon, Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon merilis Rp. 12.283.717.124 yang hanya terealisasi Rp. 10.586.012.500, mengapa demikian karena kerusakan tersebut diklarifikasikan rusak ringan 13%, rusak sedang 30,98%, rusak berat 15%, sementara ditahun 2016 ini, anggaran pemeliharaan jalan Kabupaten Cirebon mencapai Rp. 12 miliar.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 3 Februari 2016 dengan Bapak Kepala Bidang Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon Ir. Gatot Rachmanto mengatakan :

“ anggaran Rp. 12 miliar itu bagi kami kecil atau kurang ideal karena tidak cukup untuk memperbaiki secara keseluruhan jalan Kabupaten Cirebon, saya sangat mengakui tentang kerusakan jalan yang tiada hentinya dan cukup terbilang tinggi, dan rusaknya infrastruktur jalan ini juga ramai diperbincangkan dimedia sosial, tetapi selain kerusakan jalan kabupaten jalan desa sepanjang 589,57 km punmengalami kerusakan, dari panjang tersebut 37,8% dalam keadaan baik, dalam keadaan ringan 32%, dalam kedaan sedang 20% dan rusak berat yaitu 25%, ditahun 2016 ini akan banyak kegiatan untuk peningkatan jalan, seperti akan menambah panjang jalan kabupaten sepanjang 50,17 km untuk desa 48 km”.

Hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa data yang terdapat di di lakip dengan wawancara berbeda, karena adanya kendala yaitu cukup banyak infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon cukup banyak.

### C. Pemerataan Alokasi Biaya Secara Merata dalam Mengevaluasi Program

**Tabel 3.8 Alokasi Biaya Program Evaluasi Dinas bina marga kabupaten Cirebon**

Pembangunan	Pemeliharaan	Anggaran	Lokasi
1. Program pembangunan jalan dan jembatan.		48.881.910.000	Kabupaten Cirebon
-Perencana pembangunan jalan		509.350.000	Kabupaten Cirebon
- Pembanguna jalan		44.148.815	Kabupaten Cirebon
-Pembangunan Jembatan		4.113.745	Kabupaten Cirebon
	2. Program pemeliharaan jalan dan jembatan	11.766.187.425	Kabupaten Cirebon
	- Program pemelihara	273.400.000	Kabupaten Cirebon
	- Pemeliharaan Jalan	11.188.642.025	Kabupaten Cirebon
	- Pemeliharaan Jembatan	1.470.979.000	Kabupaten Cirebon

*Sumber : Lakip Dinas bina Marga Kabupaten Cirebon*

Indikator pemerataan digunakan untuk melihat apakah alokasi biaya dan manfaat dari program yang dilaksanakan telah didistribusikan secara merata kepada kelompok sasaran. Secara umum dana dari Program Pelayanan Infrastruktur diperbatasan kecamatan panguragan dengan kecamatan klangenan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sudah dimanfaatkan.

Penulis mendapatkan keterangan dari wawancara dengan Bapak Ir. Gatot Rachmanto selaku Kepala Peningkatan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon,

wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 di Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon.

beliau memeberikan jawaban “...Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal meningkatkan pelayanan kinerja terkait perbaikan infrastruktur Bapak Bupati Kabupaten Cirebon sangat peduli terhadap pelayanan infrastruktur di wilayah Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2016 pemerintah kabupaten cirebon dalam hal ini Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon mengalokasikan untuk peningkatan jalan sebesar 223.124.000 secara umum yang terdiri dari 97 paket kegiatan peningkatan jalan dan 10 jembatan, kalo dari sisi alokasi anggaran untuk penyediaan infrastruktur jalan mencapai 6,34% dari APBD kabupaten cirebon yang jumlahnya 3.4 triliun, dan pada tahun 2104, namun di tahun 2014 dana yang terlealisasi sebesar Rp. 847.462.868, tahun 2015 Rp. 796.906.045, dan tahun 2016 Rp. 981.072.312 dari APBD.....”

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dana yang dialokasikan disetiap tahunnya mengalami naik turun dikarenakan adanya capaian yang melebihi target dan kurang dari target yang diinginkan, oleh karena itu Dinas Bina Marga terus melakukan evaluasi kinerja terkait dengan pemeliharaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Cirebon terkhusus di jalan poros diperbatasan Kecamatan Panguragan dengan Kecamatan Klangeran.

#### **D. Responsivitas Pemerintah dan Masyarakat Terkait Masalah infrastruktur diperbatasan Kecamatan Panguragan dan Kecamatan Klangeran**

Untuk menilai apakah hasil kebijakan/program yang telah dilaksanakan memberikan kepuasan. Responsifitas mencerminkan tanggapan atas hasil dari program apakah memberikan meberikan kepuasan kepada masyarakat pada tanggal , idikator untuk kriteria responsivitas ini penulis melakukan observasi

sekaligus wawancara dengan salah satu warga yang lewat di jalan poros perbatasan antara kecamatan panguragan dengan kecamatan klungenan, beliau adalah seorang ibu yang bernama ibu sutirah berusia 40 tahun yang sudah memiliki 2 orang anak, anak pertama sudah duduk di bangku SMA dan anak kedua sudah duduk di bangku SMP, ibu sutirah setiap pagi dan sore melintasi jalan poros ini beliau mengatakan.

“....saya setiap pagi dan sore selalu melintasi jalan ini dengan menggunakan sepeda motor, jalan ini rusak sejak tahun 2012 hingga sekarang belum ada perbaikan, kami warga yang sering melintasi jalan ini sangat mengeluhkan karena agak kesulitan karena banyak lobang yg tidak kecil, apalagi ketika saya melintasi jalan ini membawa barang dagangan saya khawatir akan jatuh, apalagi kalo ada mobil jalan ini medadak macet belum lagi jika hujan jalan ini banjir sulit menemukan jalan yang lobang sering kali saya terjebak, belum lagi malam hari tidak ada penerangan, kami warga disini sudah mengajukan keluhan di kecamatan, dan kabarnya tahun 2017 akan segera di perbaiki dengan cara menggunakan beton”

Secara khusus tanggapan dari masyarakat dengan kerusakan jalan poros di perbatasan kecamatan panguragan dengan kecamatan panguragan sangat dikeluhkan karena kerusakan ini menjadi salah satu kendala aktivitas masyarakat yang melintasi jalan ini, masyarakat sekitar berharap agar pemerintah daerah segera menindak lanjuti perbaikan jalan di perbatasan kecamatan panguragan dengan kecamatan klungenan.

Responsivitas selanjutnya penulis melakukan observasi sekaligus wawancara di dua kecamatan yaitu di kecamatan panguragan dengan kecamatan klungenan, yakni dengan bapak agus selaku ketua bidang infrastruktur di

kecamatan panguragan dan pak Hj. To'at selaku ketua diivisi pembangunan infrastruktur di kecamatan klangenan kabupaten Cirebon, jawaban beliau hampir sama jadi penulis menyimpulkan apa yang disampaikan oleh beliau, pak agus dan pak hj. To'at mengatakan :

“....tanggapan saya sama dengan tanggapan masyarakat, tetapi saya sedikit tahu kondisi jalan yang diperbatasan kecamatan panguragan dengan kecamatan klangenan, kondisi tanah tersebut masih labil seharusnya jalan itu dibeton karena sudah bebrapa kali di perbaiki namun tidak lama lagi rusak kembali, kami sudah melakukan musrenbang dengan pemerintah daerah, dan Alhamdulillah pemerintah daerah menanggapi dan kabarnya 2017 akan dilakukan pembangunan jalan dengan menggunakan beton...”

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui, bahwa masyarakat dan pihak kecamatan sangat menanti dengan adanya perbaikan jalan diperbatasan kecamatan panguragan dengan kecamatan klangenan, karena denganadanya perbaikan jalan poros diperbatasan tersebut akan sangat mempermudah aktivitas masyarakat sekitar maupun masyarakat luar yang melintas di jalan perbatasan tersebut, apalagi untuk para pedagang yang memang sering melintasi jalan tersebut.

#### **E. Ketepatan Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Ketepatan yaitu apakah hasil dari pelaksanaan program benar-benar berguna atau bernilai bagi masyarakat sasaran. Ketepatan program sama halnya

dengan hasil yang dicapai dari program tersebut memberikan manfaat atau tepat pada kelompok sasaran. Ketepatan yang dimaksud disini adalah merujuk pada nilai atau harga dari tujuan suatu program dapat tercapai walaupun belum semuanya dapat terselesaikan. Tujuan yang ingin dicapai dari program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Cirebon.

**Tabel 3.9 Kriteria Ketepatan Program Evaluasi Kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon**

No	Indikator	Hasil
1.	Efektifitas program yang benar-benar berguna bagi masyarakat.	Hasil yang diinginkan masih dalam tahap proses, yakni pemerintah daerah masih melakukan rancangan perbaikan jalan diperbatasan kecamatan panguragan dengan kecamatan klangenan.
2.	Program tepat sasaran	Pemerintah kabupaten cirebon dalam hal ini bapa bupati sangat peduli terhadap pelayanan infrastruktur di wilayah kabupaten cirebon, namun untuk perbaikan jalan yang diperbatasan kecamatan panguragan dengan kecamatan klanmgenan belum terlealisasi masih dalam perencanaan

*Sumber: Analisis data primer, 2016*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa program evaluasi kinerja dinas bina marga kabupaten Cirebon belum terlealisasi pada perbaikan jalan diperbatasan kecamatan panguragan dan kecamatan klangenan, masih dalam tahap proses perencanaan, hasilnya belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar, karena jika dilihat dari jenis tanah pada jalan perbatasan kecamatan panguragan dengan kecamtan panguragan masih labil, sesuai dengan wawancara penulis dengan

narasumber yaitu Pak Gatot selaku Kepala Peningkatan Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon beliau mengatakan:

“...ada sedikit kendala di jalan perbatasan tsb memang mempunyai karakter daya dukung tanah yang spesifik (labil) sehingga harus ditangani secara khusus yaitu dengan menggunakan beton. Sedangkan kita mengetahui bersama membutuhkan dana yang besar sehingga dalam hal ini pemerintah kabupaten Cirebon memerlukan partisipasi dari pemerintahan pusat dalam hal ini melalui DAK (dana alokasi khusus) dan Insha Allah pada tahun 2017 nanti jalan yang dimaksud sudah dapat ditangani...”

Akan tetapi untuk evaluasi kinerja pada infrastruktur yang lain cukup terlealisasi dengan baik, penulis mengetahui dari data sekunder yang didapat oleh lakip dinas bina marga kabupaten Cirebon.

**Tabel. 3.10 Resume**

No	Indikator	Angka keberhasilan program
1.	Efektifitas pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan	56%
2.	Efisiensi manfaat biaya dari program untuk mencapai hasil yang diinginkan	54%
3.	Pemerataan alokasi biaya secara merata dalam mengevaluasi program	60,34%
4.	Responsivitas pemerintah dan masyarakat terkait masalah infrastruktur perbatasan kecamatan pengurangan dengan kecamatan klangenan kabupaten Cirebon	90%
5.	Ketetapan pelaksanaan program evaluasi kinerja pemerintah kabupaten Cirebon	65%

*Sumber: penulis*

D

ari

tabel

diatas

menje

laskan tentang angka keberhasilan dari program-program yang terlaksana oleh pemerintah kabupaten Cirebon terkhusus dari Dinas Bina Marga Kabupaten Cirebon, masing-masing memiliki kendala yaitu :

- a. Efektifitas, kurangnya mengenali jenis tanah di jalan yang sering mengalami kerusakan, dan minimnya sumber daya manusia, banyak kurangnya kesadaran dari masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi menjaga keutuhan jalan tersebut.
- b. Efisiensi manfaat biaya dari program untuk mencapai hasil yang diinginkan, dana yang digunakan oleh pemerintah yang dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan menurut lakip sudah nyaris sempurna, akan tetapi dari anggaran program infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2016 jumlahnya sangat berbeda, karena kerusakan jalan setiap tahunnya berbeda-beda sehingga menurut penulis efisiensi dari manfaat biaya dari program pencapaian hasil adalah 54%.
- c. Responsivitas pemerintah dan masyarakat terkait masalah infrastruktur perbatasan kecamatan pengurangan dengan kecamatan klangenan kabupaten Cirebon, responsivitas masyarakat terhadap kerusakan infrastruktur jalan dikabupaten Cirebon sangatlah tanggap, mereka sangat merasakan perubahannya, masyarakat menanggapi kerusakan jalan tersebut dengan cara melakukan musrenbang bersama pihak desa atau pihak kecamatan yang berharap pengaduan atau keluarganya bisa disampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera menangani perbaikan jalan dikabupaten Cirebon, khususnya di jalan alternatif perbatasan antara kecamatan pangurangan dengan kecamatan klangenan.

- d. Ketepatan pelaksanaan program evaluasi kinerja pemerintah kabupaten Cirebon, ada beberapa program pemerintah daerah kabupaten Cirebon melaksanakan programnya dengan tepat salah satu contohnya adalah jalan utama yang menghubungkan antara dua kecamatan yaitu kecamatan gebang dengan kecamatan babakan Kabupaten Cirebon sudah baik, pemerintah kabupaten Cirebon telah memperbaiki infrastruktur jalan dengan cara membeton jalan tersebut hingga akses jalan untuk melintasi 2 kecamatan itu telah lancar.